

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu prestasi perusahaan yang wujudkan pada laporan keuangan sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan pada periode waktu tertentu (Helfert,2008). Menurut Brigham dan Houston (2001) dalam intania handiani (2016) pengertian kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, dimana salah satu tujuan didirikannya perusahaan yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam peningkatan nilai perusahaan. Menurut IAI (2007) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efisien.

Jumingan (2006) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan dengan mengreview data keuangan, menghitung, mengukur, menginterpretasikan, dan yang terakhir adalah memberikan solusi terhadap keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Munawir (2010) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah salah satu dasar

penilaian terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat dilakukan dengan menganalisa terhadap rasio keuangan perusahaan, pihak yang berkepentingan sangat memerlukan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola kegiatan operasionalnya.

Kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya yaitu *Good corporate governance* dan *financial leverage*. *Good corporate governance* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena dengan adanya tata kelola yang baik disuatu perusahaan akan membuat proses monitoring berjalan dengan baik sehingga kinerja dari agen perusahaan dapat diawasi dan kontrol yang akan berdampak pada tercapainya target perusahaan yang diikuti juga dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, (Arief Nour ranchman,2015) dan *Financial leverage* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena semakin besar hutang perusahaan berarti kas perusahaan juga bertambah, maka dengan bertambahnya kas perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspansi yang lebih besar sehingga penjualan perusahaan akan meningkat yang diikuti juga dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, (Arief Nour ranchman,2015).

Pada penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu dan rasio ini merupakan ukuran profitabilitas yang dilihat dari sudut pandang pemegang saham (Mamduh Hanafi, 2004). Menurut Abdul Hamid, Bertilia Lina Kusrina, Wardoyo (2015), menyatakan bahwa *Return On Equity* (ROE) adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bagi pemegang saham.

2. *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate governance* diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1999 setelah adanya pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan pedoman tentang *good corporate governance* di Indonesia pada tahun 2000 dan direvisi pada tahun 2006, pedoman tersebut berisi tentang bahwa perusahaan harus menerapkan prinsip *Good Corporate governance* (Eko Sunarwan, 2015). *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan (Sutedi, 2011). *Good corporate governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang berisi peraturan untuk mengatur hubungan antara pemilik perusahaan, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak pemegang kepentingan internal dan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dengan kata lain *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengendaikan perusahaan. Jika *good corporate governance* disuatu perusahaan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, maka semua proses kegiatan perusahaan akan berjalan baik, sehingga akan berdampak pada membaiknya kinerja perusahaan baik yang sifatnya *financial* ataupun *non financial*, (Eko Sunarwan, 2015).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan ada prinsip-prinsip yang dapat menjadi indikator utama dari *good corporate governance* yaitu; *Fairness*, *Transparency*, *Accountability*, dan *Responsibility*. Prinsip-prinsip ini penting untuk diterapkan secara konsisten disuatu perusahaan karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat menghalangi aktivitas

menyimpang kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan perusahaan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, (Eko Sunarwan, 2015).

a. Fairness (Keadilan)

Prinsip keadilan adalah suatu kesetaraan yang menjamin adanya perlakuan adil dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stakeholder yang timbul akibat adanya perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham terutama pada pemegang saham yang memiliki jumlah saham kecil seperti pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing yang memiliki akses dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Dengan adanya perlakuan yang adil diharapkan semua peraturan dapat ditepati agar dapat melindungi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pertumbuhan perusahaan, selain itu dengan adanya prinsip keadilan ini dapat meminimalisir perilaku menyimpang yang dapat merugikan pihak lain, (Eko Sunarwan, 2015).

b. Disclosure/Transparency (Transparansi)

Menurut Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mendefinisikan transparansi sebagai adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, keterbukaan dalam informasi materiil dan relevan dengan keadaan perusahaan. Secara sederhana

transparansi dapat diartikan sebagai adanya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan, dan juga pengelolaan perusahaan. Informasi yang diaudit harus dilakukan secara benar, akurat, tepat waktu, dan independen dimana hanya untuk kepentingan perusahaan. Prinsip transparansi ini dilakukan dalam suatu perusahaan agar pemegang saham dan orang lain dapat mengetahui keadaan perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan nilai pemegang saham, (Eko Sunarwan, 2015).

c. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah adanya suatu kejelasan fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban di suatu perusahaan, sehingga tata kelola perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen perusahaan juga dituntut harus membuat job description agar adanya suatu kejelasan fungsi, hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggungjawab antar pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi di suatu perusahaan. Jika akuntabilitas ini dapat dijalankan secara efektif di suatu perusahaan maka perusahaan akan terhindar dari adanya konflik keagenan yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi, keinginan, dan kepentingan, (Eko Sunarwan, 2015).

d. Responsibility (Responsibilitas)

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa prinsip responsibilitas ini adalah suatu prinsip pertanggungjawaban perusahaan terhadap shareholder dan stakeholder. Prinsip tanggungjawab ini dimaksudkan agar tujuan dari *good corporate governance* dapat direalisasikan untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti pemerintah, masyarakat umum, dan asosiasi bisnis. Prinsip ini juga berhubungan dengan adanya kewajiban perusahaan dalam mentaati semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk peraturan dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Peraturan dan hukum yang berlaku pasti memiliki sanksi yang jelas dan tegas, sehingga ketaatan perusahaan pada peraturan dan hukum yang berlaku ini dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum yang sudah diatur dan juga sanksi moral dari masyarakat umum, (Eko Sunarwan, 2015).

e. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 menyatakan bahwa ada 1 prinsip tambahan lagi yaitu *Independence* atau kemandirian. Prinsip *Independence* ini adalah suatu keadaan perusahaan yang dikelola secara professional tanpa adanya benturan kepentingan, pengaruh, atau adanya tekanan dari pihak manapun yang

tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, (Eko Sunarwan, 2015).

Tujuan dari *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance memaparkan bahwa corporate governance merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka, (Sutedi, 2011):

- a. Membantu tercapainya keberlanjutan perusahaan yang baik melalui pengelolaan perusahaan karena adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Membantu proses pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Membantu pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan tetap dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- e. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

- f. Membantu meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan pasar terhadap perusahaan dengan itu dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Menurut Gendut (2010) dalam like monisa wati (2012) menyatakan bahwa manfaat dari penerapan *good corporate governance* pada perusahaan ada enam yaitu;

- a. Perusahaan dapat memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum sesuai dan belum mendukung terealisasinya *good corporate governance*.
- b. Kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat karena adanya hasil publikasi dan pemberian ranking dari *The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)*.
- c. Kesadaran pihak internal dan stakeholder perusahaan akan meningkat terhadap pentingnya penerapan *good corporate governance* untuk pertumbuhan keberlanjutan perusahaan.
- d. Penerapan *good corporate governance* akan menjadi masukan dalam pengambilan suatu kebijakan yang diperlukan perusahaan.

- e. *Corporate governance perception index* (CGPI) sebagai ukuran standar mutu yang ingin diperoleh perusahaan berupa pengakuan masyarakat karena adanya prinsip dari *good corporate governance*.
- f. Mendorong semua anggota organisasi perusahaan untuk berkomitmen dan bertanggungjawab dalam menerapkan *good corporate governance*.

Menurut otoritas jasa keuangan nomor 2/POJK.05/2014 yang berisi tentang penerapan *good corporate governance* yang baik bagi perusahaan yaitu ;

- a. Perusahaan wajib menjalankan prinsip *good corporate governance* dalam setiap aktivitas yang dijalankan dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasinya.
- b. Rapat umum pemegang saham perusahaan wajib dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perusahaan wajib memiliki anggota dewan direksi minimal 3 orang.
- d. Perusahaan wajib memiliki anggota dewan komisaris minimal 3 orang, minimal setengah dari jumlah dewan komisaris merupakan dewan komisaris independen.
- e. Anggota dewan komisaris perusahaan wajib menghadiri rapat dewan komisaris minimal 80% dari jumlah rapat dewan komisaris dalam 1 periode.

- f. Untuk membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam proses pengawasan, dewan komisaris membentuk komite audit dan komite pemantau resiko.
- g. Pemegang saham perusahaan melalui rapat umum pemegang saham harus memastikan perusahaan dijalankan dengan sehat sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan.

Pengelolaan yang baik disuatu perusahaan akan membuat proses monitoring berjalan dengan lancar sehingga kinerja dari agen perusahaan dapat diawasi dan kontrol yang akan berdampak pada tercapainya target perusahaan yang diikuti juga dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, selain itu, penerapan *good corporate governance* pada perusahaan akan memberikan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk mendapatkan berbagai manfaat yang salah satunya yaitu mendapatkan kepercayaan investor, karena GCG memiliki prinsip utama yaitu keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, dan kemandirian. Prinsip-prinsip inilah yang akan membuat investor percaya terhadap perusahaan dan akan menimbulkan rasa optimis investor terhadap perusahaan, sehingga tidak menutup kemungkinan investor akan menanamkan modal yang lebih besar yang nantinya dapat digunakan perusahaan untuk kegiatan ekspansi sehingga penjualan perusahaan akan meningkat dan diikuti juga dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan (Arief Nour ranchman, 2015).

Pada penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan :

a. Jumlah Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pimpinan perusahaan dan Dewan Direksi bisa seseorang yang memiliki perusahaan atau seseorang yang profesional dan ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Dewan direksi suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dewan direksi dalam menjalankan kegiatan operasional harus dalam batas yang ditentukan oleh UUPT, anggaran dasar, dan RUPS serta dibawah pengawasan dewan komisaris (Sulistyo et al, 2017).

Dalam UU No.40 Tahun 2007, pasal 1 menyatakan bahwa dewan direksi adalah suatu organ perusahaan yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab secara penuh atas kepengurusan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik diluar maupun di dalam pengadilan dengan ketentuan anggaran yang berlaku, (Maria Fransisca Widyati,2013). Selain itu Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan

sampai kepala bagian (manajer), menyetujui anggaran tahunan perusahaan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan, sehingga semakin besar jumlah dewan direksi disuatu perusahaan maka semakin kuat pengawasan dan kontrol yang dilakukan dewan direksi terhadap perilaku manajemen agar tetap bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Sukandar, 2014).

Berdasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

b. Jumlah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada dewan direksi untuk memastikan perusahaan melaksanakan *Good Corporate governance* (GCG), (KNKG, 2006). Sementara *Forum For Corporate Governance Indonesia* (FCGI) menyatakan bahwa dewan komisaris adalah inti dari *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen

dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas perusahaan. KNKG (2006), membedakan dewan komisaris menjadi dua yaitu:

- 1) Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan perusahaan. Hubungan afiliasi ini adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis, kekeluargaan, anggota direksi, dan dewan komisaris serta hubungan dengan perusahaan itu sendiri, adanya hubungan ini nantinya akan mempengaruhi kemampuan dewan komisaris dalam bertindak independen atau semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance,2006). Keberadaan komisaris independen diatur di Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ pada tanggal 1 Juli 2000,dalam peraturan ini menyatakan bahwa persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris, (Sukandar,2014).

Semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan yang dilakukan kepada dewan direksi akan lebih kuat lagi serta nasihat yang diberikan pun akan lebih baik dan beragam lagi kepada dewan direksi sehingga nantinya akan mempengaruhi perilaku dewan direksi dalam upaya peningkatan kinerja keuangan, Maria Fransisca (2013) .

Berdasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

2) Komisaris Non independen adalah komisaris yang memiliki hubungan terafiliasi dengan pihak perusahaan, (Sukandar,2014).

c. Jumlah Komite Audit

Komite audit merupakan sekumpulan orang yang tidak berhubungan dengan tugas sehari-hari manajemen perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyatakan bahwa komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara professional dan independen semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan itu tugas dari komite audit adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam memonitor pihak manajemen perusahaan atas seluruh proses pelaporan keuangan perusahaan, pelaksanaan audit, dan pelaksanaan corporate governance diperusahaan (Maria Fransisca Widyati (2013).

Bapepam mengeluarkan surat edaran No.03/PM/2000 dan ditunjukkan kepada direksi emiten, perusahaan publik untuk mewajibkan terbentuknya komite audit di setiap perusahaan. Selain itu

pengaturan mengenai jumlah komite audit di atur dalam Bapepam-LK No.IX.I.5 yang berisi tentang emiten dan perusahaan public diwajibkan untuk membentuk komite audit dengan jumlah minimal tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen yang bertindak sebagai ketua dari komite audit (Maria Fransisca Widyati (2013).

Semakin banyak jumlah komite audit di suatu perusahaan maka semakin baik juga pengawasan dan kontrol yang diberikan komite audit terhadap proses akuntansi dan keuangan perusahaan. Sehingga kesempatan terjadinya penyimpangan untuk memenuhi kepentingan pribadi dapat diminimalisir dan ini pun akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan, (Maria Fransisca, 2013).

Berdasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

d. Kepemilikan Institusional

Arief Nour Rachman (2015), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak instuti dan pemerintahan. Dalam bursa saham kepemilikan

institusional merupakan kepemilikan jumlah saham oleh lembaga keuangan non bank seperti perusahaan reksadana, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, yayasan swasta, wakaf atau lembaga besar lainnya yang mengelola dana atas nama orang lain.

Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional disebutkan oleh Permanasari (2010) sebagai berikut :

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manager. Pengawasan oleh investor institusi dapat memaksimalkan kinerja manager dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

3. Teori Keagenan

Teori Agensi ini timbul setelah adanya fenomena pemisahan wewenang antara pemegang saham atau pemilik perusahaan dengan agen pihak yang mengelola perusahaan. Teori Agensi ini menekankan pentingnya pemilik perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada agen (tenaga profesional) karena mereka lebih memahami bagaimana cara menjalankan bisnis dengan baik (*Good Corporate Governance*, Adrian Sutedi, 2011).

Tujuan utama dari adanya pemisahan wewenang ini yaitu agar pemilik perusahaan dapat memperoleh laba yang semaksimal mungkin

dengan biaya yang seefisien mungkin, itu karena perusahaan dikelola oleh tenaga kerja yang profesional. Tenaga profesional ini memiliki tugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan untuk menjalankan dan mengelola manajemen perusahaan. Semakin besar perusahaan yang dikelola maka semakin besar keuntungan yang diperoleh pihak agen perusahaan, sementara pemilik perusahaan hanya memiliki tugas untuk memonitor dan mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan pihak agen perusahaan bekerja hanya semata untuk kepentingan perusahaan (*Good Corporate Governance*, Adrian Sutedi, 2011).

Namun, dampak negatif dari adanya pemisahan wewenang ini yaitu dengan adanya keleluasaan pihak agen dalam mengelola perusahaan maka pihak agen juga memiliki keleluasaan dalam memaksimalkan laba perusahaan yang mengarah kepada kepentingan pribadi dengan biaya yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. Pemisahan wewenang ini dapat juga menimbulkan kurangnya tingkat transparansi dalam penggunaan dana perusahaan serta kurangnya keseimbangan antara pemilik perusahaan dengan pihak agen perusahaan (*Good Corporate Governance*, Adrian Sutedi, 2011).

Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Maria Fransisca (2013) mengatakan bahwa pemisahan wewenang ini juga dapat menimbulkan masalah keagenan yang disebabkan karena adanya asimetri informasi

dimana pihak agen perusahaan lebih banyak mengetahui tentang informasi internal perusahaan dan keadaan perusahaan dimasa depan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Agen perusahaan dapat mengeksploitasi keuntungan melalui informasi yang disampaikan kepada pemilik perusahaan. Menurut Jensen dan Mekling (1976) dalam Maria Fransisca (2013) mengatakan bahwa penyebab utama dari konflik antara pemilik perusahaan dengan agen perusahaan karena adanya perbedaan pendapat, persepsi, keinginan, yang berkaitan dengan pembuatan keputusan tentang pencairan dana dan bagaimana dana yang diperoleh itu diinvestasikan dan menurut (Copeland dan Weston,1992) menyatakan bahwa pemegang saham sulit mempercayai agen perusahaan bisa bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena pada dasarnya manusia memiliki tiga asumsi sifat yaitu; manusia pada dasarnya hanya mementingkan diri sendiri, manusia memiliki keterbatasan daya pikir dalam mepersepsikan masa depan, dan manusia pada dasarnya selalu menghindari resiko, Eisenhardt (1989) dalam Sukandar (2014).

Untuk meminimalisir konflik kepentingan ini maka diperlukan poses monitoring dan kontrol dari pemilik perusahaan terhadap kinerja agen perusahaan agar perusahaan terhindar dari adanya kegiatan penyimpangan yang nantinya akan berdampak negatif bagi perusahaan, selain itu adanya proses monitoring ini digunakan perusahaan untuk memastikan agen dapat mengelola modal perusahaan dengan baik sehingga modal yang telah

ditanamkan di perusahaan dapat berkembang secara maksimal, (Sukandar,2014). Proses monitoring yang dijalankan dengan optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai target atau tujuan perusahaan, (Arief Nour Rachaman et al, 2015).

4. *Financial Leverage*

Financial leverage ini adalah sumber pendanaan perusahaan yang didapatkan dari eksternal perusahaan yaitu hutang, dimana hutang ini akan digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber pendanaan internal perusahaan seperti penyertaan modal, keuntungan, laba di tahan (Arief Nour Rachman et al, 2015). Penambahan modal perusahaan dengan utang berarti kas perusahaan juga bertambah, maka dengan bertambahnya kas perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasionalnya dengan harapan laba yang diterima juga semakin meningkat, (Siti Nur Aini, 2013).

Menurut Bambang Riyanto (2001) dalam Abdul Hamid (2015) menyatakan bahwa *Financial leverage* merupakan tingkat penggunaan dana dengan beban tetap yang diharapkan dapat memperbesar pendapatan bagi pemegang saham. *Leverage* adalah ukuran yang menunjukkan jumlah sejauh mana perusahaan dapat berpenghasilan tetap dengan menggunakan hutang yang digunakan dalam sumber pendanaan perusahaan, adapun tujuan dari penggunaan hutang atau *leverage* yaitu untuk meningkatkan

laba bagi pemegang saham perusahaan. Dengan memperbesar leverage maka unsur ketidakpastian mendapatkan laba akan semakin besar tapi juga dapat memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan laba yang semakin besar (Dina Wharoh, 2014).

Menurut Siti Nur Aini, (2013), menyatakan bahwa penggunaan *leverage* secara efektif dan efisien dapat membuat perusahaan beroperasi, berinvestasi, dan mengembangkan usahanya secara maksimal sehingga profitabilitas perusahaan juga dapat meningkat. Semakin besar hutang perusahaan berarti kas perusahaan juga bertambah, maka dengan bertambahnya kas perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspansi yang lebih besar sehingga penjualan perusahaan akan meningkat yang diikuti juga dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Arief Nour ranchman, 2015).

Berdasarkan teori Trade-Off dalam Struktur Modal (dalam Mamduh, 2004) menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya karena semakin tinggi hutang perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan kebangkrutnya yang dialami perusahaan. Resiko kebangkrutan yang semakin tinggi ini disebabkan karena semakin besar bunga yang harus dibayarkan perusahaan, kemungkinan tidak membayar bunga yang tinggi semakin besar dan pemberi pinjaman bisa membangkrutkan perusahaan jika tidak bisa membayar hutang. Biaya lain dari peningkatan hutang adalah meningkatnya biaya keagenan hutang.

Teori ini mengatakan apabila hutang perusahaan meningkat maka konflik antara pemegang saham dengan pemegang hutang juga akan semakin meningkat, maka semakin meningkat pengawasan yang dilakukan oleh pemegang hutang. Selain itu, nilai perusahaan dengan hutang akan semakin meningkat dengan meningkatnya hutang. Tetapi nilai tersebut akan mulai menurun apabila sudah mencapai titik optimalnya.

Pendekatan Modigliani dan Miller tanpa pajak (dalam Mamduh, 2004) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang, dalam kondisi perusahaan tanpa pajak struktur modal tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Tingkat keuntungan dan keputusan investasi yang akan mempengaruhi nilai perusahaan bukan dengan keputusan pendanaan.

Pendekatan Modigliani dan Miller dengan pajak (dalam Mamduh, 2004) menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan akan meningkat apabila perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari utang, meningkatnya nilai perusahaan dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. Apabila semakin banyak pendapatan perusahaan maka semakin banyak pajak yang harus ditanggung perusahaan dan apabila pendapatan perusahaan sedikit maka akan sedikit juga pajak yang ditanggung perusahaan. Keputusan berhutang membuat perusahaan membuat perusahaan harus membagi pendapatannya untuk beban pajak dan bunga. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat hutang

yang tinggi lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk membayar bunga hutang. Berkurangnya pendapatan setelah beban bunga secara tidak langsung akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Adanya aliran kas keluar untuk membayar pajak menjadi sedikit dan secara tidak langsung akan membuat profitabilitas perusahaan meningkat, meningkatnya profitabilitas perusahaan akan menarik investor untuk berinvestasi terhadap perusahaan. Banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi terhadap perusahaan akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini *financial leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Kasmir (2014), *Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi total kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri perusahaan, sehingga rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan utang.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut (Rosalia Budi Ratnasari, Kartika Hendra Titisari, Suhendro, 2016) yang meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan

dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (I.B Made Puniayasa dan Nyoman Triaryati, 2016) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Intania Hadiani, 2016) yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Arief Nour Racham, Sri Mangesti Rahayu, Topowijono, 2015) yang meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* dan *financial leverage* terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis PLS dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, *financial leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Maria Fransisca Widyati, 2013) yang meneliti tentang pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan

bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan dewan direksi, komite audit, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (Wuryanti K dan Siti Khotimah, 2015) yang meneliti tentang pengaruh *financial leverage* terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *financial leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Diana Surya Kusuma Putri, 2016) yang meneliti tentang pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Billy Sanjaya dan Almatius Setya Marsudi, S.E.,Ak.,M.Si.,C.A , 2015) yang meneliti tentang pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Kusdiyanto dan Dezy Dwi Kusumaningrum, 2015) yang meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, komisaris independen dan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Dwi Risma Dewi,2016) yang meneliti tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Menurut (Sulistiyowati dan Fidiana, 2017) yang meneliti tentang pengaruh dewan direksi dan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Ahmad ali,2015) yang meneliti tentang pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan telekomunikasi dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) perusahaan.

Menurut (Wisma Tytus Harimukti,2016) yang meneli tentang pengaruh dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi berganda dengan

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (Ridho Alief Noviawan dan Aditya Septiani, 2013) yang meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (Kuslinah Riniati, 2015) yang meneliti tentang pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja perusahaan dengan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut (Shella Ekawati Ludijanto, Siti Ragil Handayani, Raden Rustam Hidayat, 2014) yang meneliti tentang pengaruh analisis leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE).

Menurut (Jonathan Bestwan Sitohang, 2017) yang meneliti tentang pengaruh komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alat analisis regresi linear

berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (Panky Pradana Sukandar, 2014) yang meneliti tentang pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (Dini Kurniawati, 2015) yang meneliti tentang pengaruh *financial leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alat analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *financial leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

C. Pengaruh hubungan antar Variabel dan Penurunan Hipotesis

1. *Good corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan kepemilikan institusional.

a. Pengaruh jumlah dewan direksi terhadap kinerja keuangan.

Dewan direksi bertugas untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan,

mengawasi tugas dari karyawan sampai kepala bagian (manajer), menyetujui anggaran tahunan perusahaan, dan menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Dengan itu, semakin besar jumlah dewan direksi disuatu perusahaan maka semakin kuat juga pengawasan dan kontrol dewan direksi terhadap perilaku manajemen agar tetap bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Rosalia Budi ratnasari, Kartika Hendra Titisari, Suhendro, 2016) dan (Sulistyowati dan Fidiana, 2017) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H1: Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

- b. Pengaruh jumlah dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan.

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi terhadap perusahaan, sehingga diharapkan setiap tindakan yang dilakukan dewan komisaris independen terhadap perusahaan lebih objektif. Dewan komisaris independen bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Sehingga, semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan yang dilakukan kepada dewan direksi akan lebih kuat lagi serta nasihat yang diberikan juga akan lebih baik dan beragam lagi kepada dewan direksi sehingga nantinya akan mempengaruhi perilaku dewan direksi dalam upaya peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Maria Fransisca Widyati, 2013) dan (Diana Surya Kusuma Putri, 2016) menyatakan

bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H2 : Jumlah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

c. Pengaruh Jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan.

Komite audit merupakan sekumpulan orang yang tidak berhubungan dengan tugas sehari-hari manajemen perusahaan. Komite audit memiliki fungsi untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam memonitor pihak manajemen perusahaan atas seluruh proses pelaporan keuangan perusahaan, pelaksanaan audit, dan pelaksanaan corporate governance diperusahaan tersebut. Jadi, semakin banyak jumlah komite audit di suatu perusahaan maka semakin baik juga perlindungan dan kontrol yang diberikan komite audit terhadap proses akuntansi dan keuangan perusahaan. Sehingga kesempatan terjadinya penyimpangan untuk memenuhi kepentingan pribadi dapat diminimalisir dan ini pun akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

Berdasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan

dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Dezy Dwi Kusumaningrum, 2015) dan (Kuslinah Riniati, 2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan

H3 : Jumlah Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

d. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak instuti dan pemerintahan. Kepemilikan institusional ini akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan karena investor institusional tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba, kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic

manajer. Pengawasan oleh institusi dapat memaksimalkan kerja manajer dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada teori keagenan yang menyatakan bahwa proses monitoring dalam perusahaan dapat menghalangi kegiatan menyimpang dalam perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya proses monitoring yang optimal dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Intania Hadiani, 2016) dan (Maria Fransisca Widyati, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2. Pengaruh *Financial Leverage* terhadap kinerja keuangan.

Financial leverage adalah sumber pendanaan perusahaan yang diperoleh dari hutang. Semakin tinggi financial leverage perusahaan maka semakin besar laba perusahaan dikarenakan dengan berhutang perusahaan dapat melakukan penghematan pajak. Berdasarkan pada teori Pendekatan Modigliani dan Miller dengan pajak (dalam Mamduh, 2004) menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan akan meningkat apabila perusahaan

menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari utang, meningkatnya nilai perusahaan dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. Semakin banyak pendapatan perusahaan maka semakin banyak pajak yang harus ditanggung perusahaan dan apabila pendapatan perusahaan sedikit maka akan sedikit juga pajak yang ditanggung perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk membayar bunga hutang. Berkurangnya pendapatan setelah beban bunga secara tidak langsung akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Adanya aliran kas keluar untuk membayar pajak menjadi sedikit dan secara tidak langsung akan membuat profitabilitas perusahaan meningkat, meningkatnya profitabilitas perusahaan akan menarik investor untuk berinvestasi terhadap perusahaan. Banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi terhadap perusahaan akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan.

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Arief Nour Rachman et al, 2015) dan (Wuryanti K, Siti Khotimah, 2015) menyatakan bahwa *financial leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H5 : *Financial Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

